

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Demokrasi menghasilkan hubungan antara negara dan rakyat dalam posisi yang sama[1]. Hubungan antara masyarakat dan pemerintah sebagai bagian dari negara berubah secara signifikan selama era demokrasi. Tujuan demokrasi adalah untuk mewujudkan kesejahteraan negara, yang membuat kedudukan "negara" dan "rakyat" sejajar dengan "eksekutif" dan "legislatif"[1]. Perwujudan dari sistem demokrasi dapat melalui penyelenggaraan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung dan juga keikutsertaan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang ada di setiap daerah.

Dalam pelaksanaan proses demokrasi, Kota Malang menjadi salah satu bukti partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan mengadakan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tingkat kota yang diadakan oleh Bappeda Kota Malang. Perencanaan pembangunan daerah, juga dikenal sebagai Musrenbang, adalah program pemerintah yang bertujuan untuk menarik minat dan partisipasi masyarakat. Musrenbang berfungsi sebagai wadah di mana masyarakat dan pemerintah dapat menyampaikan pendapat dan kebutuhan mereka. Pemerintah daerah dapat mengetahui kebutuhan masyarakat secara langsung melalui forum Musrenbang yang disediakan oleh pemerintah[2]. Maka dari itu, pemerintah daerah dituntut untuk mempercepat dan memudahkan pengumpulan data dari masyarakat, salah satunya dalam bentuk aspirasi. Bappeda Kota Malang merupakan salah satu yang bertanggung jawab dalam mengumpulkan data dan informasi pembangunan di Kota Malang dengan cara menampung dan mengategorikan aspirasi/usulan tersebut sesuai dengan bidang masing-masing di setiap dinas yang bersangkutan, lalu semua aspirasi/usulan yang disetujui akan disatukan menjadi kamus usulan. Namun, dalam pengumpulan data aspirasi masyarakat, masih terdapat beberapa kendala seperti kurang efektifnya metode pengumpulan data yang dilakukan.

Pada proses penampungan dan pengkategorian usulan dari masyarakat, Bappeda Kota Malang cenderung membutuhkan waktu yang lama dikarenakan dalam prosesnya masih menggunakan cara konvensional yang kurang efektif. Dari menelusuri formulir setiap daerah, kemudian menjadikan satu dalam sebuah *file* Excel, setelah itu dikelompokkan sesuai dengan dinas terkait, dan jika disetujui barulah dimasukkan ke dalam kamus usulan. Masalah yang muncul dari cara konvensional tersebut yaitu membutuhkan waktu yang lama untuk memasukkan data aspirasi dari kertas ke dalam bentuk *file* Excel, dikarenakan banyaknya aspirasi yang masuk dari setiap desa yang berada di daerah Kota Malang. Lalu pengumpulan aspirasi juga membutuhkan waktu yang lama dikarenakan setiap desa yang ingin mengumpulkan aspirasinya ke Bappeda perlu menunggu seluruh aspirasi dari desa lainnya yang masih berada dalam kecamatan yang sama untuk dikumpulkan. Maka dari itu berdasarkan permasalahan yang dialami, peneliti mengidentifikasi sistem informasi yang lebih efektif untuk menggantikan cara yang sudah ada. Pemilihan atau pengembangan sistem informasi yang tepat dapat meningkatkan keefektifan Bappeda Kota Malang dalam mendata aspirasi masyarakat.

Teknologi yang digunakan untuk mengolah data dikenal sebagai teknologi informasi. Ini termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan individu, perusahaan, dan pemerintahan, serta sebagai informasi strategis yang digunakan untuk pengambilan keputusan[3]. Sekarang semua aktivitas pemerintahan bergantung pada teknologi informasi dan komunikasi. Ini memungkinkan lembaga manajemen mengelola sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif dan efisien[4]. Komputersasi pemerintahan atau e-government, serta sumber daya manusia dan pendidikan, harus dilakukan untuk mencapai target penerapan teknologi informasi[3]. Dengan implementasi teknologi informasi dan komunikasi pada instansi pemerintahan sangat membantu dan semakin penting dalam memperoleh data aspirasi masyarakat. Maka dari itu, mengingat pentingnya fungsi pengelolaan data menggunakan teknologi informasi, terutama pada instansi pemerintahan maka wajar jika pemerintah menempatkan pengelolaan data dan informasi sama pentingnya dengan pengelolaan sumber daya lainnya.

Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Andi & Mahdika, 2023), sebuah *prototype* sistem atau aplikasi yang dibangun dapat membantu salah satu bidang pengarsipan di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur (Diskominfo Jatim) dalam pengelolaan arsip. *Prototype* yang dikembangkan membuat Diskominfo Jatim tidak perlu menggunakan media cetak (*hardfile*) yang memiliki banyak kelemahan. Andi dan Mahdika menggunakan model *design thinking* untuk membuat *prototype* aplikasi web untuk sistem peminjaman dokumen arsip. Solusi yang ditawarkan oleh peneliti sesuai dengan keinginan Diskominfo Jatim untuk sebuah sistem berbasis teknologi yang membantu dalam pengelolaan arsip[6].

Dalam proses perancangan sistem informasi pendataan aspirasi masyarakat di Bappeda Kota Malang, penulis menggunakan *prototyping*, yaitu suatu model yang dapat digunakan untuk mensimulasikan program yang ditawarkan oleh pengembang kepada pelanggan sehingga pelanggan dapat lebih memahami program dan memilih program yang paling sesuai untuk mereka gunakan[6]. Beberapa tujuan penggunaan *prototype* dalam penelitian ini yaitu agar memungkinkan untuk validasi konsep sistem yang akan dikembangkan. Dengan menunjukkan *prototype* kepada pemangku kepentingan, penulis dapat mendapatkan umpan balik lebih awal tentang fitur dan fungsionalitas yang diharapkan. Kemudian penulis juga dapat mengidentifikasi kebutuhan pengguna secara lebih konkret, yang dapat meningkatkan kesesuaian sistem dengan kebutuhan nyata. Lalu *prototype* juga dapat memberikan gambaran visual tentang bagaimana sistem akan berfungsi. Penghematan waktu dan biaya juga menjadi tujuan dalam penggunaan *prototype* agar dapat mengatasi masalah pada tahap awal lebih efisien dibandingkan dengan mengoreksi kesalahan setelah pengembangan sistem yang sebenarnya sudah selesai. Maka dari itu, dalam perancangan *prototype* diharapkan dapat membantu *developer* untuk menuangkan dan mempresentasikan konsep dan ide produk sampai menjadi produk final yang bisa memenuhi kebutuhan serta keinginan calon pengguna. Dan juga tanpa adanya *prototype*, pengembang akan kesulitan dalam menggambarkan ide produk apabila hanya bermodal teori saja. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam perancangan *prototype* tersebut adalah menggunakan pendekatan *design thinking*.

Metode ini berpusat pada pengalaman pengguna (*user*) dan juga digunakan untuk menemukan solusi yang paling efisien untuk masalah yang kompleks[7]. Metode ini memecahkan masalah yang belum terdefinisi secara jelas dengan mempelajari kebutuhan pengguna aplikasi, mengumpulkan ide dalam sesi *brainstorming*, dan menggunakan pendekatan langsung melalui pembuatan *prototype* dan pengujian langsung[8]. *Empatize, define, ideate, prototype, dan testing* adalah lima langkah dalam proses *design thinking*[9].

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa efektif *prototype* yang dikembangkan berdasarkan metode *usability testing*?
2. Seberapa puas pengguna menggunakan *prototype* berdasarkan metode *System Usability Scale*?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang *prototype* sistem informasi pendataan data aspirasi masyarakat di Bappeda Kota Malang dengan menggunakan pendekatan *design thinking*. Beberapa tujuan khusus yang ingin dicapai adalah:

- a. Menghasilkan *prototype* yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.
- b. Menghasilkan *prototype* yang mudah digunakan oleh pengguna, baik oleh pegawai Bappeda Kota Malang maupun oleh masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi mereka.

Dengan tujuan penelitian yang jelas dan spesifik, diharapkan hasil penelitian dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendataan aspirasi masyarakat di Kota Malang, serta memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan.

## 1.4. Batasan Penelitian

Dalam pembuatan penelitian ini, ruang lingkup permasalahan memiliki beberapa batasan sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya berfokus pada perancangan *prototype*, tidak termasuk pengembangan dan implementasi secara keseluruhan.
- b. Penelitian ini akan difokuskan pada Bappeda Kota Malang sebagai organisasi pemerintahan yang bertanggung jawab dalam pendataan aspirasi masyarakat di Kota Malang.
- c. Responden penelitian terdiri dari pegawai Bappeda Kota Malang yang terlibat dalam proses pendataan aspirasi masyarakat.
- d. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan *design thinking* sebagai metode utama dalam merancang *prototype*.
- e. Perancangan *prototype* menggunakan *tools* Figma.
- f. Bentuk perancangan *protoype* berbentuk aplikasi *web desktop*.

Dengan adanya batasan penelitian yang jelas, diharapkan hasil penelitian dapat lebih fokus dan memberikan manfaat yang lebih nyata dalam pengembangan *prototype* sistem informasi pendataan aspirasi masyarakat di Kota Malang.

